



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TIDAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD MUHLISIN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 817149

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.724.000.000

1. Tanah Seluas 67 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 134.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/54 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 88 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 146.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO GT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.930.000.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.930.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.